

STRATEGI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2030

Nikolaus Saras Kurniawan¹, Sandi Asmara², Adnin Musadri Asbi¹

¹ Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Lampung Selatan

² Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung

¹ Email : nkurniawan888@gmail.com

DOI : 10.35472/jppk.v2i1.672

ABSTRACT

One of the most important element in the region is the existence of green open space, especially public green open spaces that have ecological, cultural, economic, aesthetic, and also playing role as a city lungs. The need of public green open space as a means of recreation and community interaction is not balanced with the number of available public green open spaces that can support the population. This research uses a SWOT analysis, land use and public green open space analysis, and population projections. The results shows some strategies that can help to restore the supply of green open spaces on the green side of population, which is: optimize the water use areas to make green public spaces, to use the removal of the land for public green spaces, and to use the ground in hill areas for use as open space. Public green areas such as parks or forests, and green facilities that support public activities should be maintained to support community activities.

Keywords: Strategy, Public Green Open Space, Population

A. PENDAHULUAN

Salah satu unsur penting dalam suatu daerah selain fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) terutama RTH publik yang memiliki fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, estetika, dan juga merupakan paru-paru kota. RTH publik adalah RTH yang status kepemilikannya merupakan milik dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Permen PU, 2008). Banjir, polusi udara, menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres, dan krisis sosial yang meningkat merupakan akibat dari turunnya kuantitas dan kualitas RTH publik di perkotaan yang akan berdampak pada lingkungan perkotaan karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial (Dwiyanto, 2009).

RTH Publik merupakan ruang terbuka seperti taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri PU Nomor: 05/PRT/M/2008 disebutkan proporsi RTH Publik di kawasan perkotaan yaitu seluas 30% yang merupakan ukuran minimal RTH, 20% diantaranya yaitu RTH publik dan 10% diantaranya yaitu RTH privat untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta meningkatkan nilai estetika kota.

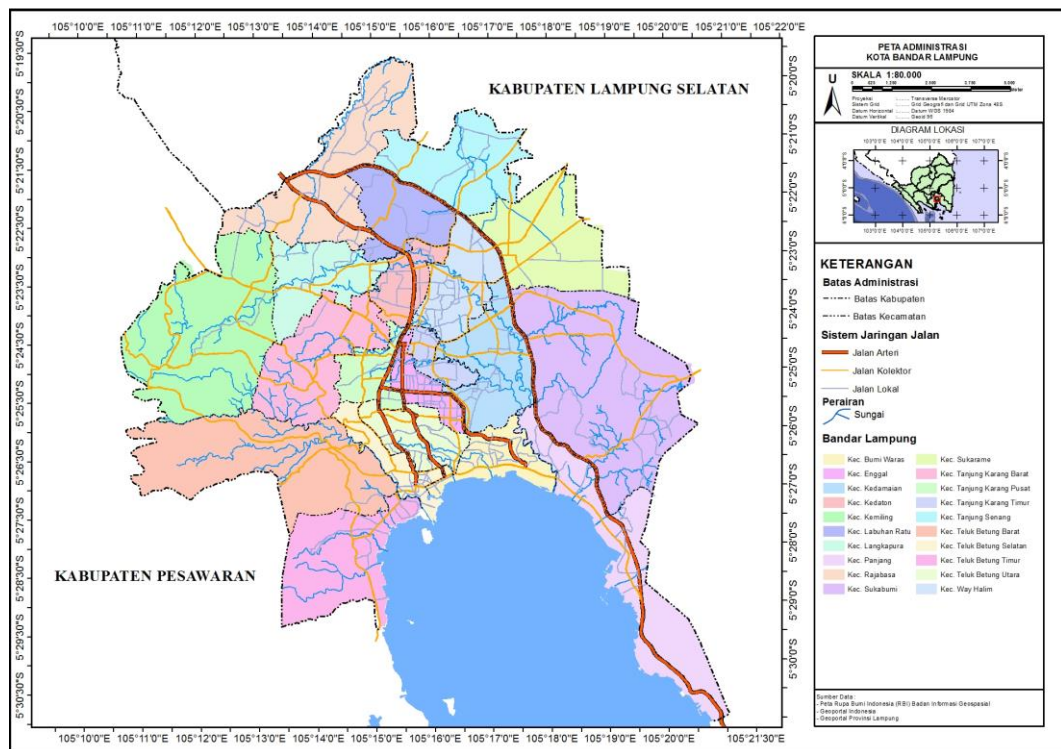
RTH publik berfungsi sebagai tempat untuk berinteraksi terhadap sesama, daya tarik masyarakat, serta estetika wilayah. Padatnya suatu kota (sebagai contoh di Kota Bandar Lampung) salah satunya dikarenakan makin bertambahnya penduduk yang berpengaruh pada perkembangan wilayah yang semakin berkembang dalam membangun kota.

Menurunnya kapasitas dan daya dukung wilayah dapat terlihat dari pencemaran yang meningkat, ketersediaan air tanah yang menurun, suhu kota yang meningkat, serta penurunan keindahan alami kota. Meningkatnya kebutuhan RTH publik sebagai sarana rekreasi dan memperbaiki mental masyarakat tidak diimbangi dengan jumlah RTH publik yang tersedia dan faktor eksternal seperti penduduk pendatang yang memilih untuk menetap di wilayah ini.

B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah sebesar 19.722 Ha. Secara administratif, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar dan Kabupaten Lampung Selatan, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Berikut merupakan peta administrasi Kota Bandar Lampung.



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, 2021

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung

2. Teori

Tabel 1. Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH), Lahan, dan Kelereng

No.	Sumber	Definisi
1	Lussetyowati (2011)	Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan adalah ruang-ruang terbuka yang berada pada suatu wilayah perkotaan yang terdiri oleh vegetasi yang berguna untuk mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya
2	Sadyohutomo (2006)	Lahan dapat dikaitkan pada unsur pemanfaatan/penggunaan dari bentang tanah yang dalam hal ini dipahami sebagai ruang sehingga lahan berbeda dengan tanah. Tanah (<i>soil</i>) dan materi tanah (<i>materials</i>) yang menekankan pada sifat fisik tanah secara kimiawi dan organik
3	Putra, Bayurohman dan Ani Apriani (2018)	Kelerengan dilihat dari peta kontur, tingkat kerapatan garis kontur menentukan tingkat kemiringan lereng. Makin rapat garis kontur, maka makin terjal lerengnya

Sumber: Olahan daftar Pustaka, 2021

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial kuantitatif dengan menggambarkan persebaran RTH publik, penggunaan lahan dan kelerengan lahan di Kota Bandar Lampung. Sedangkan, pendekatan kuantitatif digunakan untuk pengolahan data dalam perhitungan proyeksi RTH publik, dan pengolahan data dalam menganalisis strategi penyediaan RTH publik.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari teknik pengumpulan data instansional seperti Dinas Perumahan dan Permukiman dan BAPPEDA, serta studi literatur seperti RTRW dan BPS Kota Bandar Lampung. Dalam menghitung proyeksi penduduk, digunakan rumus dari Pedoman Perhitungan Proyeksi Penduduk dan Angkatan Kerja yang kemudian dikalikan dengan luas minimal RTH/kapita sebagai berikut:

$$P_t = P_0 \cdot e^{rt}$$

Pada interpretasi penggunaan lahan, pemilihan lahan yang cocok atau berpotensi untuk dijadikan RTH publik yaitu lahan dengan fungsi guna lahannya sebagai resapan air, sedangkan dalam interpretasi kelerengan lahan, pemilihan lahan dilakukan dengan melihat sifat dan kesesuaian lahan. Penggunaan data guna lahan dari instansi terkait dan RTRW berdasarkan data yang didapat dan data kelerengan lahan yang di dapat dari *Earth Explorer* USGS.

Tabel Error! No text of specified style in document.2. Kelas Lereng dan Karakteristik Lahan

Kelas Lereng	Karakteristik Lahan
0 –5 %	Lahan cocok untuk pengembangan permukiman dan pertanian. Sebagian berpotensi terhadap bencana banjir dan drainase yang buruk
5 –5 %	Irigasi terbatas tetapi baik untuk <i>dry farming</i> , drainase baik dan cocok untuk pengembangan permukiman/perumahan.
15 -30 %	Lahan baik untuk pengembangan industri ringan, perumahan, dan fasilitas rekreasi.
30–50 %	Lahan cocok untuk area rekreasi, tempat peristirahatan, hutan atau padang rumput.
>50 %	Lahan sesuai untuk tempat hewan liar, hutan dan padang rumput yang terbatas.

Sumber: Noor, 2006

Dalam menentukan strategi penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan suatu analisis yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri merupakan suatu proses pengambilan keputusan strategis yang dikaitkan dengan visi, tujuan, strategi dan kebijakan yang perlu memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Wardoyo, 2011).

Faktor kekuatan (*strengths*) merupakan keunggulan yang sudah dimiliki lokasi penelitian terkait RTH publik dan potensi yang ada dalam pengembangannya dan untuk faktor kelemahan (*weaknesses*) merupakan kekurangan yang ada terkait RTH publik. Kemudian faktor peluang (*opportunities*) merupakan faktor luar yang dapat dimanfaatkan demi pengembangan ruang terbuka hijau publik dan untuk faktor ancaman (*threats*) merupakan faktor luar yang dapat merusak pengembangan RTH publik.

Menurut Wardoyo (2011), untuk keperluan analisis menggunakan *External Factor Analysis Summary* (EFAS) dan *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dengan bentuk format matriks EFAS dan IFAS di atas.

- Bobot faktor = Maksimum total bobot yaitu 1.
- *Rating* faktor Kekuatan/Peluang = 1 sampai 4.
- *Rating* faktor kelemahan/ancaman = -4 sampai -1.

Tabel 3. Matriks SWOT

IFAS/EFAS	<i>Strengths</i>	<i>Weaknesses</i>
<i>Opportunity</i>	Strategi S-O Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<i>Threats</i>	Strategi S-T Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

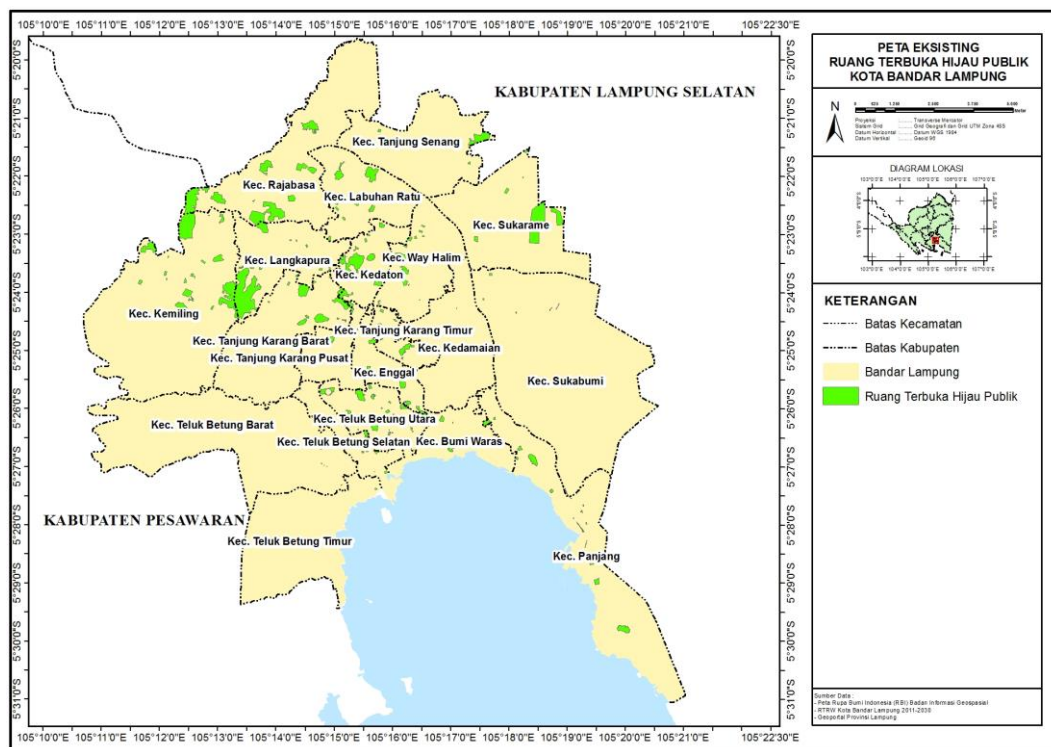
Sumber: Wardoyo, 2011

Dengan terbentuknya strategi dari hasil matriks SWOT, selanjutnya dapat dibuat suatu kebijakan yang dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan strategi yang telah diwujudkan dari hasil matriks SWOT untuk membentuk arahan kebijakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan luas daerah penelitian yaitu seluas 19.722 Ha, standar untuk luas RTH publik di Kota Bandar Lampung yaitu seluas 3944,4 Ha atau 20%. Pada tahun 2016, RTH publik di Kota Bandar Lampung berkurang luasannya menjadi 533,86 Ha atau sekitar 2,70% dari total luas Kota Bandar Lampung (Laporan Rencana Evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030, 2016). Dengan melihat hal tersebut, RTH publik semakin jauh dari standar luas yang disebutkan pada Permen PU Nomor: 05/PRT/M/2008 yaitu 20% dari total luas kota. sebaran RTH publik di Kota Bandar Lampung tersebar tidak merata.

RTH publik berkumpul di beberapa kecamatan saja dengan melihat RTH publik sesuai dengan luas minimal RTH seperti yang terjadi di Kecamatan Kemiling dengan 3 taman kelurahan dan 4 taman kecamatan, Kecamatan Rajabasa dengan 6 taman kecamatan. Sedangkan, beberapa kecamatan tidak memiliki RTH publik seperti Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Kedamaian, dan Kecamatan Teluk Betung Timur.



Sumber: Hasil Analisis, 2021

Gambar 2. Peta Eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandar Lampung

Tabel 4. Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandar Lampung 2016

No	Jenis RTH	Luas (Ha)
1	Taman Kota	19,25
2	Taman Lingkungan Perumahan	2,4
3	Taman Lingkungan Perkantoran	8,9
4	Taman Hutan Raya	347,78
5	Hutan Kota	83
6	Pemukaman	40,33
7	Lapangan Olahraga	25,7
8	Jalur Hijau	6,5
Total Luas RTH		533,86

Sumber : Laporan Rencana Evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030, 2016

Berdasarkan pada tabel 5, dihasilkan proyeksi RTH publik yaitu bertipe taman kota pada Peraturan Menteri PU No: 05/PRT/2008. Kebutuhan pada RTH publik taman kota dengan luas RTH/kapita yang dibutuhkan taman kota yaitu 0,3 m². Pada tahun 2021 kebutuhan akan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung yaitu seluas 362.280 m² atau 36,2 Ha dengan jumlah taman kota yang dibutuhkan yaitu 3 unit, dan pada tahun 2030 kebutuhan tersebut meningkat menjadi 496.418 m² atau 49,6 Ha dengan jumlah taman kota yang dibutuhkan tetap 3 unit. Pada Laporan Rencana Evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030, taman kota yang ada di Kota Bandar Lampung memiliki luas 19,25 Ha, sehingga taman kota belum memenuhi kebutuhannya dengan contoh di perbatasan Kecamatan Kedaton dan Kecamatan Tanjung Karang Barat yaitu Teropong Kota Bukit Cindy. Berikut tabel kebutuhan RTH taman kota dengan luas yang dibutuhkan.

Tabel 5. Kebutuhan RTH Taman Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2030

No	Luas RTH/ Kapita (m ²)	Tahun	Penduduk	RTH yang Dibutuhkan (m ²)
1	0,3	2021	1.207.601	362.280
2	0,3	2022	1.250.615	375.185
3	0,3	2023	1.295.162	388.549
4	0,3	2024	1.341.295	402.389
5	0,3	2025	1.389.072	416.722
6	0,3	2026	1.438.550	431.565
7	0,3	2027	1.489.791	446.937
8	0,3	2028	1.542.857	462.857
9	0,3	2029	1.597.813	479.344
10	0,3	2030	1.654.726	496.418

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel 6. Kebutuhan RTH Hutan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2030

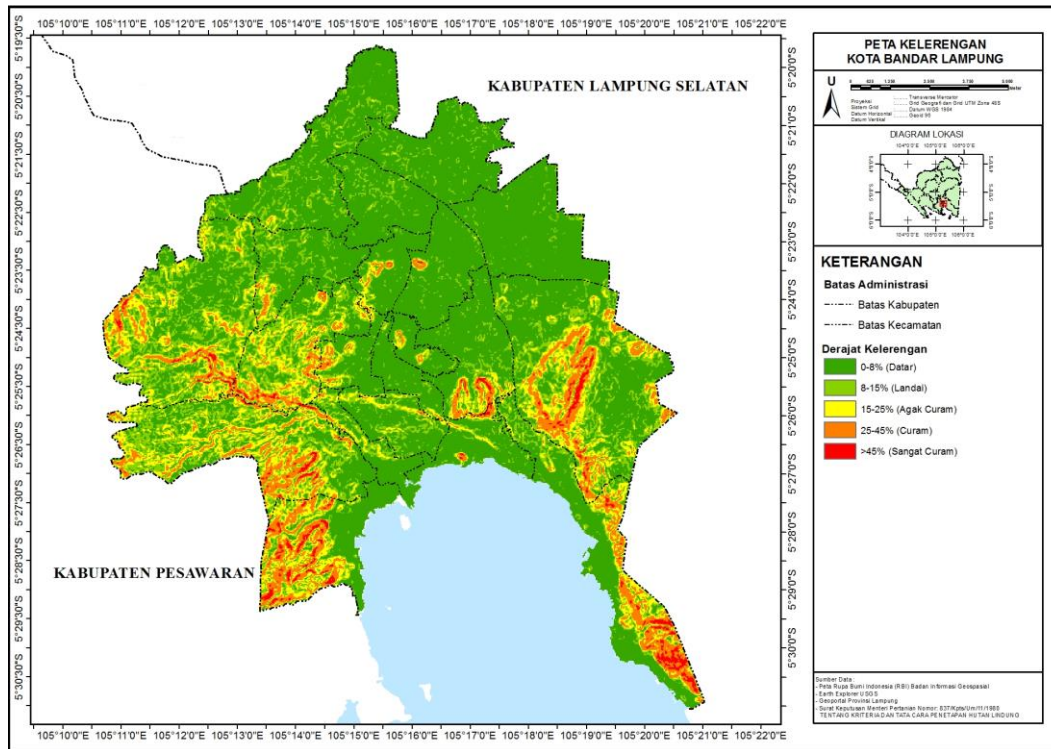
No	Luas RTH/ Kapita (m ²)	Tahun	Penduduk	RTH yang Dibutuhkan (m ²)
1	4	2021	1.207.601	4.830.404
2	4	2022	1.250.615	5.002.461
3	4	2023	1.295.162	5.180.648
4	4	2024	1.341.295	5.365.181
5	4	2025	1.389.072	5.556.287

No	Luas RTH/ Kapita (m ²)	Tahun	Penduduk	RTH yang Dibutuhkan (m ²)
6	4	2026	1.438.550	5.754.200
7	4	2027	1.489.791	5.959.163
8	4	2028	1.542.857	6.171.427
9	4	2029	1.597.813	6.391.251
10	4	2030	1.654.726	6.618.906

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Pada tabel 6 merupakan kebutuhan RTH bertipe hutan kota dengan luas RTH/kapita yaitu 4 m² yang berpedoman pada Permen PU 05/2008. Pada tahun 2021 kebutuhan akan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung yaitu seluas 4.830.404 m² atau 483 Ha, dan kemudian pada tahun 2030 kebutuhan tersebut meningkat menjadi 6.618.906 m² atau 661,8 Ha. Berdasarkan peta eksisting RTH publik pada Laporan Rencana Evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030, Kota Bandar Lampung memiliki taman hutan raya dan hutan kota dengan total 430,78 Ha, sebagai contoh berada di Bukit Sakura yang ada di Kecamatan Kemiling yang ada di perbatasan Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Langkapura. Sehingga, hutan kota di Bandar Lampung belum memenuhi kebutuhan RTH publik berdasarkan jumlah penduduk.

Interpretasi penggunaan lahan menggunakan peta guna lahan seperti pada gambar 3, enam wilayah yaitu Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Panjang, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat, dan Kecamatan Teluk Betung Timur, penggunaan lahannya didominasi oleh daerah resapan air. Daerah resapan air juga terdapat di Kecamatan Kedaton tepatnya Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Sukamenanti, dan Kecamatan Kedamaian tepatnya di Kelurahan Tanjung Gading, walaupun luasannya kecil tetapi dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau publik. Daerah resapan air adalah daerah meresapnya air hujan ke dalam tanah yang kemudian menjadi air tanah serta memiliki fungsi sebagai penambah cadangan air tanah dan mengurangi potensi kemungkinan terjadinya banjir. (Wibowo, 2006). Daerah resapan air tersebut merupakan lahan kosong yang terdapat vegetasi yang tumbuh dan cocok dijadikan ruang terbuka hijau publik.



Sumber: Hasil Analisis, 2021

Gambar 4. Peta Kelerenghan Kota Bandar Lampung

Untuk menyusun strategi penyediaan RTH publik perlu dilakukan evaluasi faktor internal dan eksternal atas kondisi penyediaan RTH publik di Kota Bandar Lampung. Kekuatan (*strength*) merupakan segala sesuatu terkait RTH yang berpotensi untuk dikembangkan dan kelemahan (*weaknesses*) merupakan segala sesuatu terkait RTH yang dapat menghambat pengembangan dan tidak berfungsi dengan baik, kedua hal tersebut merupakan faktor internal. Sedangkan faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) berkaitan dengan kesempatan dan peluang yang ada untuk mengoptimalkan RTH dan ancaman (*threats*) merupakan hal yang dapat mengancam ketersediaan RTH.

Tabel 7. Matriks IFAS – Faktor Kekuatan

Faktor Strategis Kekuatan	Urutan Bobot	Bobot (B)	Rating (R)	Nilai N=BxR
Terdapat fasilitas yang menunjang aktivitas masyarakat	2	0,3	3	0,9
Terdapat daerah resapan air/lahan kosong	3	0,4	4	1,7
Terdapat kawasan yang bisa dikembangkan untuk pembangunan RTH	2	0,3	3	0,9
Total	7	1		3,4

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel 8. Matriks IFAS – Faktor Kelemahan

Faktor Strategis Kelemahan	Urutan Bobot	Bobot (B)	Rating (R)	Nilai N=BxR
Kurangnya RTH untuk memenuhi kebutuhan penduduk	3	0,38	-2	-0,75
Lahan kosong yang terbatas dan makin berkurang	3	0,38	-3	-1,13
Perubahan guna lahan yang tidak sesuai dengan arahan RTRW	2	0,25	-1	-0,25
Total	8	1		-2,1

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil evaluasi IFAS yang terdiri dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan diperoleh bahwa faktor kekuatan bernilai 3,4 sedangkan faktor kelemahan bernilai -2,1. Ini berarti faktor kekuatan dari RTH publik di Kota Bandar Lampung lebih memiliki keuntungan untuk dikembangkan sebagai RTH publik dengan memanfaatkan faktor-faktor yang ada daripada faktor kelemahan yang dapat menghambat pengembangan dan tidak berfungsinya RTH publik dengan baik. Jumlah nilai/skor dari matriks IFAS yaitu 1,3.

Tabel 9 Matriks EFAS – Faktor Peluang

Faktor Strategis Peluang	Urutan Bobot	Bobot (B)	Rating (R)	Nilai N=BxR
Pembebasan lahan dari pemerintah	3	0,4	4	1,71
Pengalihan hak kepemilikan lahan	2	0,3	4	1,14
Memiliki lahan dengan kelerengan area kuning dan jingga	2	0,3	3	0,86
Total	7	1		3,7

Sumber: Hasil Analisis, 2021

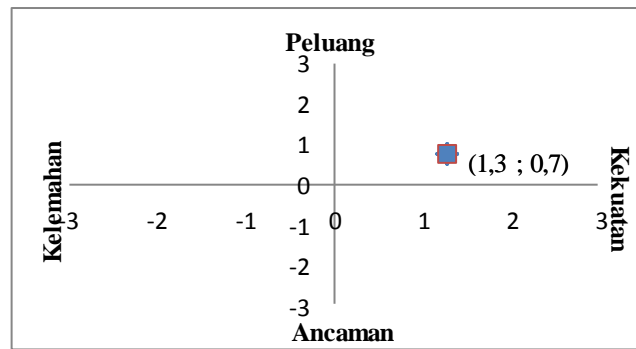
Tabel 10. Matriks EFAS – Faktor Ancaman

Faktor-Faktor Strategis Ancaman	Urutan Bobot	Bobot (B)	Rating (R)	Nilai N=BxR
Makin bertambahnya penduduk	3	1	-3	-3
Total	3	1		-3

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil evaluasi EFAS yang terdiri dari faktor peluang dan faktor ancaman diperoleh bahwa faktor peluang bernilai 3,7 sedangkan faktor ancaman bernilai -3. Hal ini menunjukkan faktor peluang dari RTH publik di Kota Bandar Lampung lebih memiliki kesempatan dan peluang yang berasal dari luar yang dapat dimanfaatkan untuk dikembangkannya RTH publik dengan memanfaatkan faktor-faktor yang ada. Sehingga jumlah nilai/skor dari EFAS yaitu 0,7.

Kedua nilai tersebut saling bertemu di titik koordinat (1,3;0,7) pada kuadran I yaitu kuadran *Aggressive Strategy* dalam diagram kuadran SWOT seperti grafik di bawah ini.



Sumber: Hasil Analisis, 2021

Gambar 5. Diagram Kuadran SWOT

Tabel 11. Matriks SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
IFAS dan EFAS	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat fasilitas yang menunjang aktivitas masyarakat • Terdapat daerah resapan air/lahan kosong • Terdapat kawasan yang bisa dikembangkan untuk pembangunan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya RTH untuk memenuhi kebutuhan penduduk • Lahan kosong yang terbatas dan makin berkurang • Perubahan guna lahan yang tidak sesuai dengan arahan RTRW
Peluang (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan lahan dari pemerintah • Pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik dari masyarakat • Memiliki lahan dengan kelerengan area kuning dan jingga 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan daerah resapan air untuk dijadikan RTH publik dan memanfaatkan hasil pembebasan lahan untuk RTH publik • Memanfaatkan lahan di area perbukitan untuk dijadikan RTH publik seperti taman, atau hutan • Meningkatkan dan memelihara penghijauan fasilitas yang menunjang aktivitas masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Membebaskan lahan milik pribadi yang dalam RTRW penggunaan lahannya adalah untuk RTH dan diubah menjadi RTH publik • Membuat RTH bertipe hutan kota atau taman rekreasi di area perbukitan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan jumlah penduduk
Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> • Makin bertambahnya penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan daerah resapan air sesuai dengan guna lahannya • Membuat RTH bertipe taman kecamatan di daerah resapan air yang berada di beberapa kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan penggunaan lahan kosong atau resapan air yang dialihfungsikan menjadi lahan terbangun dan mempertahankan fungsi guna lahan

Sumber: Peneliti, 2021

Tabel 12. Arah Kebijakan Penyediaan RTH Publik

No	Strategi	Arah Kebijakan	OPD
1	Mengoptimalkan daerah resapan air untuk dijadikan RTH publik dan memanfaatkan hasil pembebasan lahan untuk RTH publik	• Pemaksimalan penggunaan lahan resapan air sebagai RTH publik	Disperkim
		• Pemanfaatan lahan dari masyarakat dengan menjadikan lahan tersebut menjadi RTH publik	Disperkim
2	Memanfaatkan lahan di area perbukitan untuk dijadikan RTH publik seperti taman atau hutan	• Pemanfaatan penggunaan lahan kosong di area perbukitan sebagai hutan kota atau taman	Disperkim
		• Peningkatan akses dan keamanan taman atau hutan kota perbukitan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3	Meningkatkan dan memelihara penghijauan fasilitas yang menunjang aktivitas masyarakat	• Peningkatan SDM dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas penunjang aktivitas masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
4	Mempertahankan daerah resapan air sesuai dengan guna lahannya	• Penetapan fungsi lahan resapan air sesuai dengan penggunaan lahan	BAPPEDA
		• Pelarangan pengalihfungsian lahan resapan air	BAPPEDA
5	Membuat RTH bertipe taman kecamatan di daerah resapan air yang berada di beberapa kecamatan	• Pemanfaatan lahan resapan air di semua kecamatan untuk dijadikan taman kecamatan	Disperkim
6	Membebaskan lahan milik pribadi yang dalam RTRW penggunaan lahannya adalah untuk RTH dan diubah menjadi RTH publik	• Pengendalian atas penggunaan lahan	BPN
		• Melakukan ganti rugi dengan pihak yang lahannya dibebaskan	DPRD
7	Membuat RTH bertipe hutan kota atau taman rekreasi di area perbukitan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan jumlah penduduk	• Pemanfaatan lahan perbukitan sebagai taman rekreasi dan hutan kota	Disperkim
		• Peningkatan keamanan dan akses di taman dan hutan kota area perbukitan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
8	Mengendalikan penggunaan resapan air yang diubah menjadi lahan terbangun dan mempertahankan fungsi guna lahan	• Pembuatan regulasi dan pelarangan pengalihan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan guna lahan	BAPPEDA

Sumber: Peneliti, 2021

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan, dapat diambil kesimpulan bahwa, strategi yang dapat membantu dalam pemulihan penyediaan RTH publik dilihat dari jumlah penduduk yaitu dengan mengutamakan strategi *Agressive Strategy* yaitu mengoptimalkan daerah resapan air untuk dijadikan RTH publik yaitu di Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Panjang, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat, dan Kecamatan Teluk Betung Timur, selain itu juga

terletak di Kecamatan Kedaton tepatnya Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Sukamenanti, dan Kecamatan Kedamaian tepatnya di Kelurahan Tanjung Gading. Memanfaatkan hasil pembebasan lahan untuk RTH publik, memanfaatkan lahan di area perbukitan untuk dijadikan RTH publik seperti taman atau hutan, serta meningkatkan dan memelihara penghijauan fasilitas yang menunjang aktivitas masyarakat.

Dari ketiga strategi tersebut, dibuat beberapa kebijakan yang dapat menopang strategi yang ada yaitu pemaksimalan penggunaan lahan resapan air sebagai RTH publik, pemanfaatan lahan dari masyarakat dengan menjadikan lahan tersebut menjadi RTH publik, pemanfaatan penggunaan lahan kosong di area perbukitan sebagai hutan kota atau taman, peningkatan akses dan keamanan taman atau hutan kota perbukitan, dan peningkatan SDM dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas penunjang aktivitas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Damayanti, Fadelia et al. 2017. "Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2016." Diktat Kuliah. Bandar Lampung: Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- [2] Dwiyanto, Agung. 2009. "Kuantitas Dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Di Permukiman Perkotaan." *Jurnal Teknik*, Vol.30, no.2, hal.88-92.
- [3] *Fakta dan Analisis Evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, 2016.
- [4] Handayani, Wiwik et al. 2015. "Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Pacitan." *Jurnal Momentum*, Vol.11, no.2, hal.69-72.
- [5] Lusetyowati, Tutur. 2011. "Analisa Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus Kota Martapura." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional AVoER ke-3, Palembang, 26-27 Oktober 2011.
- [6] Noor, Djuahari. 2006. *Geologi Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- [7] *Pedoman Penghitungan Proyeksi Penduduk Dan Angkatan Kerja*. Badan Pusat Statistik, 2010.
- [8] *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan*. Kementerian Pekerjaan Umum, 2008.
- [9] Putra, B.P., Ani Apriani. 2018. "Fungsi Kawasan Berdasarkan Kelerengan Di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional RekayasaTeknologiIndustri dan Informasi XIII Tahun 2018 (ReTII), Yogyakarta, November 2018.
- [10] *Sadyohutomo. 2006. Penatagunaan Tanah*. Yogyakarta: Aditya Media.
- [11] *Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 837/Kpts/Um/11/1980 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung*. Jakarta, 1980.
- [12] Utsalina, Dwi S, et al. 2020. "Analisis SWOT Dalam Penentuan Bobot Kriteria Pada Pemilihan Strategi Pemasaran Menggunakan *Analytic Network Process*." *Jurnal Antivirus*, Vol. 14, no. 1, hal. 41-50.
- [13] Wardoyo, Paulus. 2011. *Enam Alat Analisis Manajemen*. Semarang: Penerbit Semarang University Press.